

ISLAM LOKAL VIS A VIS ISLAM PURITAN
**(Studi Kasus Konflik antara Majelis Tafsir Al-Qur'an dan Nahdlatul Ulama
di Kabupaten Gresik)**

Skripsi:

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S-1) Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat



Oleh :

Muhammad Romdloni Putra
NIM: E92214038

JURUSAN STUDI AGAMA-AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Muhammad Romdloni Putra

NIM : E92214038

Jurusan : Studi Agama-agama

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Juli 2018

Saya yang menyatakan



Muhammad Romdloni Putra

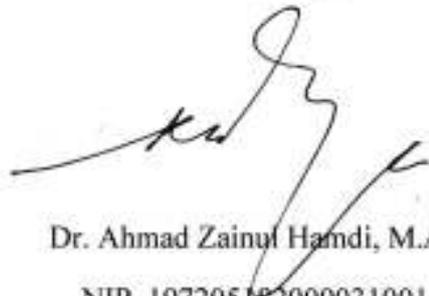
NIM: E92214038

PERSETUJUAN PEMBIMING

Skripsi oleh Muhammad Romdloni Putra ini telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 16 Juni 2018

Pembimbing,



Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag

NIP. 197205182000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

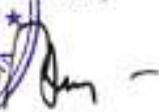
Skripsi oleh *Muhammad Romdloni Putra* ini telah dipertahankan di depan Tim
Peguji
Skripsi

Surabaya, 17 Juli 2018

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



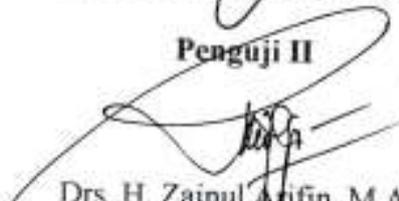
Dekan,


Dr. H. Kunawi Basyir, M.Ag
NIP. 196409181992031002

Ketua,


Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag
NIP. 197205182000031001

Penguji II


Drs. H. Zainul Arifin, M.Ag
NIP. 195602021990031001

Penguji III


H. Budi Ichwahyudi, M.Fil.I
NIP. 197604162005011004

Penguji IV


Ahmad Jazuli Afandi, Lc, M.Fil.I
NIP. 201603301



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 •
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Romdloni Putra
NIM : E92214038
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Studi Agama-agama
E-mail address : mrromdloniputra30@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Islam Lokal vis-à-vis Islam Puritan (Studi Kasus Konflik antara Majelis Tafsir Al-Qur'an dan

Nahdlatul Ulama di Kabupaten Gresik)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2018

Penulis

Muhammad Romdloni Putra

Islam itu tumbuh dan berkembang, yaitu sesuai dengan budaya Indonesia. Pada masa sekarang model keislaman khas nusantara yang kaya akan warisan budaya lokal masih terus dijaga dan dipertahankan sebagai wujud bahwa Islam merupakan agama yang *rahmatanlilalamin*. Maka dari itu akhir-akhir ini kita mengenal istilah Islam Nusantara sebagai identitas keislaman ala Indonesia, yang menjadi ciri khas keislaman yang *mainstream* bagi sebagian besar masyarakat Indonesia karena memang karakter masyarakat Indonesia yang sangat kuat dalam menjaga tradisi.

Salah satu Organisasi keislaman di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan organisasi islam terbesar menyatakan bahwa Islam Nusantara adalah identitas keislaman mereka, warga *Nahdliyin* di kenal sangat menjaga tradisi leluhur yang tentunya sangat sesuai dengan syariah Islam sehingga nilai-nilai luhur bisa diterima sepanjang tidak menyalahi syariat Islam. Dilihat dari cara ibadah mereka dan kegiatan keagamaan mereka yang sangat kental dengan tradisi lokal dan nilai-nilai luhur budaya setempat, seperti *tahlilan*, *selamatan*, *istighasah*, *wiridan*, *thariqat* dll. Tidak heran dari Aceh sampai Merauke banyak warga *Nahdliyin* yang terus menjaga dan melestarikan tradisi keislaman mereka, dengan corak khas budaya masing-masing daerah setempat. Ini juga menjadi alasan tersendiri kenapa NU bisa menjadi *mainstream* keislaman di Indonesia yang terbesar, karena daya tarik dari NU yang memiliki ciri khas keislaman yang ramah terhadap tradisi lokal yang ada.

Tetapi seiring dengan waktu dan perkembangan zaman dalam perkembangan Islam di Indonesia pada Abad ke-20 dan ke-21 ketika

kecenderungan akan kebangkitan Islam banyak didengungkan di berbagai belahan dunia yang disebabkan oleh semangat perjuangan menentang kolonialisme dan westernisasi yang dianggap telah melemahkan dunia Islam, dan dikarenakan muncul penolakan-penolakan atas bentuk demokrasi ala barat yang berusaha ditransfer kepada negara-negara lain yang memiliki sistem sosio-kultural yang berbeda dengan barat.²

Berangkat dari semangat penolakan itu bermunculan gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam yang bersifat fundamental, revivalis, dan puritan. Yang semuanya memiliki ciri khas yang sama yaitu menginginkan nilai-nilai Islam ala mereka diterapkan dalam segala bentuk interaksi dalam kehidupan masyarakat dengan jargon mereka “kembali kepada al-Qur’an dan Hadits”, karena mereka menilai Islam harus menjadi *superior* di Dunia, sehingga mereka berusaha dengan mengatasnamakan agama berusaha untuk membersihkan segala bentuk budaya yang mereka anggap tidak sesuai dengan syariat Islam, dikarenakan pemahaman mereka terhadap teks suci hanya memahami secara tekstual bukan secara kontekstual yang lebih mendalam.

Gerakan Islam Puritan, identik dengan fundamental, fanatik dan islamis.³ Yang menurut Khaled Abou El Fadl, istilah puritan lebih mencirikan terhadap kelompok tertentu, dalam hal keyakinan menganut absolutisme dan tidak mengenal kompromi. Dalam banyak hal, orientasi kelompok ini cenderung *puris*,

² Pierpaolo Donati, *Religion and Democracy in the Post-Modern World: The Possibility of a “Religiously Qualified” Public Sphere* (Vatican : Political Academy of Social Science. 2001), 323.

³ Iklila Nur Afida, “Konflik Antara Majelis Tafsir Al-Qur’an (MTA) dan Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Praktek Keagamaan di Kabupaten Bantul” (Skripsi tidak di terbitkan, Jurusan Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015), 12.

dalam arti tidak toleran terhadap berbagai sudut pandang yang berkompetisi dan tidak memandang realitas pluralis sebagai bentuk kebenaran sejati.⁴ Gerakan ini juga identik sebagai gerakan Salafi yang senantiasa menjauhkan diri mereka dari tahayyul, *bid'ah* dan *khurafat*.

Salafi menekankan ajarannya pada Tauhid, berorientasi pada teks al-Qur'an dan Sunnah dengan menanggalkan fungsi-fungsi logika serta subyektifitas dalam memahami keduanya.⁵ Dalam memahami teks suci mereka hanya melihat pada teks bukan menafsirkannya dengan menyesuaikan konteks. Maka dari itu dalam semangat gerakan mereka inilah mereka juga berusaha menghilangkan semua hal termasuk budaya-budaya lokal yang selama ini mewarnai corak keislaman di masyarakat, karena mereka menganggap budaya tersebut tidak sesuai dan tidak pernah ada dalam islam. Mereka menolak terhadap unsur keagamaan yang berakulturasi dengan budaya lokal dianggap adalah *bid'ah* dan tidak ada dasarnya dalam al-Qur'an maupun Hadits. Sikap mereka inilah yang dapat menimbulkan gesekan dalam masyarakat, sehingga menyebabkan timbulnya konflik dalam masyarakat.

Salah satu dari wujud Gerakan tersebut berdirinya sebuah organisasi yang bersifat puritan dan fundamental yaitu Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA). MTA dengan semangat puritannya seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Shofiyuddin Ichsan dalam karyanya, bahwa MTA berusaha mengikis pengamalan-pengamalan agama di masyarakat yang mereka anggap telah melenceng dari sumber dasar

⁴ Khaled Abou El-Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), 18.

⁵ Agus Moh. Najib dkk, *Gerakan Wahabi di Indonesia (Dialog dan Kritik)* (Yogyakarta: Bina Harfa, 2009), 310.

Syariat Islam. MTA tanpa kompromi berusaha membersihkan Islam dari segala bentuk yang di anggap oleh mereka syirik dan *bid'ah*.⁶ Akibat dari sikap mereka muncul konflik yang timbul akibat dari pertentangan masyarakat karena di anggap telah menghina dan melecehkan tradisi yang sudah lama dipegang teguh oleh masyarakat.

Ini juga terjadi di Kabupaten Gresik, konflik dalam masyarakat muncul akibat dari sikap MTA yang menolak tradisi lokal yang ada dan dianggap melecehkan tradisi masyarakat setempat. Sikap MTA yang mirip dengan gerakan puritanisme Wahabi, sehingga sebagian pengamat menggolongkan MTA sebagai bagian dari gerakan (neo) Salafi yang tumbuh subur sejak dasawarsa terakhir.⁷ Di Kabupaten Gresik sudah terjadi beberapa kali gesekan antara masyarakat setempat dengan jamaah Majelis Tafsir Al-Qur'an, tercatat ada usaha pengusiran terhadap jamaah Majelis Tafsir Al-Qur'an yang sebelumnya didahului dengan konflik horizontal dengan masyarakat sekitar.

Tindakan masyarakat tersebut didasarkan pada keresahan mereka terhadap kegiatan dan ajaran Majelis Tafsir Al-Qur'an, ini juga karena sikap dari jamaah Majelis Tafsir Al-Qur'an yang tidak bisa menghormati budaya maupun ritual-ritual keislaman yang dilakukan oleh masyarakat setempat, yang notabnya masyarakat sekitar merupakan warga *Nahdliyin*. Padahal di ketahui awalnya MTA aman-aman saja melakukan kegiatan mereka, tetapi ketika beberapa jamaah dari

⁶ Ahmad Shofiyuddin Ichsan, "Membumikan Islam Puritan di Jawa (Studi Atas Dinamika Pertumbuhan Gerakan Majelis Tafsir Al-Qur'an di Yogyakarta dan Jawa Tengah)" (Tesis tidak diterbitkan, CRCS Universitas Gadjah Mada 2014), 2.

⁷ Sunarwoto, "Gerakan Religio-Kultural MTA Dakwah, Mobilisasi dan Tafsir-Tanding", *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Akaruna*, Vol. 8:2 (Juli-Desember 2012), 154.

G. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini dapat mengarah pada tujuan yang diharapkan, maka akan disusun sistematika. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing membicarakan masalah yang berbeda, namun saling memiliki keterkaitan. Secara rinci, pembahasan masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini berisi pendahuluan yang bertujuan untuk memberikan gambaran objek kajian secara general. Pada bab ini akan memuat pembahasan yang meliputi latar belakang yang berisi hal-hal yang menarik untuk diteliti, sehingga penulis merasa ingin untuk meneliti lebih dalam tentang hal yang menarik pada objek penelitian tersebut. Kemudian dilanjutkan rumusan masalah yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya pertanyaan tersebut akan mengantarkan pada fokus kajian dalam skripsi ini dan fokus kajian dalam skripsi ini akan diperjelas pada tujuan penelitian. Selanjutnya, manfaat penelitian pada kajian ini berisi manfaat penelitian yang lebih mengedepankan tingkat kebutuhan pembaca terutama kalangan akademisi. Kemudian dilanjutkan dengan menyajikan telaah pustaka guna mengetahui sejauh mana topik pembahasan yang akan dikaji oleh penulis berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu. Setelah itu, metode penelitian yang berisi cara-cara mendapatkan data penelitian secara sistematis sehingga akan tercapai bentuk penelitian yang baik. Yang terakhir adalah

sistematika penulisan yang berisi informasi-informasi yang akan dibahas pada bab-bab yang telah ada.

Bab kedua, bab ini membahas landasan teori tentang konflik. Meliputi pengertian konflik, teori konflik, jenis-jenis konflik, sebab-sebab timbulnya konflik sampai pada resolusi dan manajemen konflik.

Bab ketiga, bab ini tentang deskriptif data, profil yang berkaitan dengan obyek penelitian yang dikaji, hal-hal yang berkaitan tersebut berupa sejarah, letak dan kondisi geografis, Pemerintahan dan demografis.

Bab keempat, berisi hasil penelitian, analisis, dan pembahasan yang meliputi gambaran umum MTA dan NU, ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara umum tentang MTA ataupun NU. Selanjutnya penjelasan tentang konflik yang terjadi antara MTA dan NU di Kabupaten Gresik, dari mulai penyebab terjadinya konflik, penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dan juga kondisi pasca konflik. Analisis ini merupakan hasil uraian yang dilakukan oleh penulis guna mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konflik yang terjadi antara NU dan MTA di Kabupaten Gresik..

Bab kelima, bab ini berisi penutup yang merupakan kesimpulan dari rumusan masalah yang ada di atas. Dalam penulisan kesimpulan, penulis menyimpulkannya dalam bentuk paragraf yang berisi poin-poin penjelasan yang fokus dari rumusan masalah.

Sehingga bisa dikatakan bahwa konflik bersifat inheren, artinya konflik akan selalu ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja.³ Dan merupakan sebuah konsekuensi logis dari sebuah interaksi di antara dua pihak.⁴ Menurut Suprpto ini dikarenakan dalam kehidupan manusia tidak akan bisa memiliki kesamaan yang persis dalam segala hal, pasti ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Karena konflik merupakan sesuatu yang sangat alamiah yang menyertai pola interaksi antar manusia dan akan selalu hadir dalam kehidupan sosial.⁵

Jika dikaitkan dengan kehidupan sosial yang majemuk seperti di Indonesia ini, Alo Liliweri memandang konflik sebagai suatu bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok yang berbeda etnik yang memiliki, atau merasa memiliki sasaran atau tujuan atas tindakan yang dilakukan yang tidak sejalan. Bentuk pertentangan alamiah tersebut dihasilkan oleh individu atau kelompok etnik, baik intraetnik atau antaretnik, yang memiliki perbedaan dalam sikap, kepercayaan, nilai-nilai atau kebutuhan dan juga didukung oleh motivasi dari tindakan yang memicu konflik tersebut.⁶

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa:

³ Elly M.Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 347.

⁴ Wisnu Suhardono, "Konflik dan Resolusi", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol.II No.1 (Juni, 2015), 2.

⁵ Suprpto, *Semberak Dupa di Pulau Seribu Masjid (Kontestasi, Integrasi dan Resolusi Konflik Hindu-Muslim)* (Jakarta: Kencana, 2013), 30.

⁶ Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005), 146.

konflik.¹³ Meskipun begitu teori konflik juga dinilai tidak bisa lepas total dari teori fungsionalisme struktural. Ini dikarenakan teori konflik tidak pernah lepas dari fungsionalisme struktural dalam melihat fakta sosial, sehingga bisa dikatakan sebagai teori turunan dari fungsionalisme struktural.

Jika dianalisis perbedaan antara fungsionalis struktural dan teori konflik bisa dijabarkan sebagai berikut, *pertama* menurut para penganut fungsionalisme struktural masyarakat adalah statis atau bisa dikatakan masyarakat berubah dalam keadaan yang seimbang, sedangkan menurut para teoritis konflik setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan. *Kedua* fungsionalisme struktural menekankan keteraturan masyarakat, sedangkan teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. *Ketiga* fungsionalisme struktural menyatakan bahwa setiap elemen masyarakat berperan dalam menjaga stabilitas, sedangkan teori konflik lebih melihat disintegrasi dan perubahan dalam masyarakat, karena menurut mereka setiap elemen masyarakat ikut menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan yang terjadi. Sedangkan dari fokus sudut pandang kajiannya fungsionalis cenderung melihat masyarakat secara informal diikat oleh norma nilai dan moral, sedangkan teoritis konflik melihat apapun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di atas. Selanjutnya fungsionalis memusatkan perhatian pada kohesi

¹³ Achmad Fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma* (Jakarta: Pranada Media Group, 2006), 325.

dengan individu, kelas-kelas sosial, organisasi atau antar bangsa. Selanjutnya teori konflik juga dinilai jauh dari akarnya, yaitu teori Karl Marx sehingga teori konflik sulit terlepas dari teori struktural fungsional karena merupakan reaksi dari struktural fungsional.¹⁸

Maka dari itu seperti apa yang dikatakan oleh M. Zeitlin menilai bahwa teori konflik merupakan sebuah istilah yang samar-samar, sebagaimana yang dapat kita lihat pada sederetan tokoh dalam sejarah yang mewakilinya seperti Ibn Khaldun, Machieavelli, Bodin, Hobbes, Hume, Ferguson, Smith, Malthus. Perbedaan serta persamaan intelektual diantara para pemikir tersebut sangatlah penting. Maka diketahui bahwa pokok pemikiran setiap intelektual teori konflik ini sangat beragam, bahkan dalam prespektif masing-masing ada yang bertentangan. Dengan demikian adanya bisa di lihat bahwa tidak ada keuntungan intelektual jika memperdebatkan definisi teori konflik, terlebih lagi jika teori ini dimaksudkan sebagai alternatif bagi fungsionalisme struktural.¹⁹ Sehingga bisa dikatakan perbedaan dari beberapa para ahli teori konflik tidak bisa dipermasalahkan karena setiap teori memiliki fokus dan ciri masing-masing, dan bisa saling melengkapi.

Sehingga istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional. Lewis coser dalam bukunya yang

¹⁸ Elly M.Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 370.

¹⁹ Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*, terj. Anshori dkk (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), 155-156.

penguasa terhadap massa, pandangan ini mengindikasikan pemahaman bahwa dalam masyarakat ada berbagai kepentingan yang berbeda-beda, tetapi perbedaan ini tidak akan menjadikan terguncangnya stabilitas sosial jika dapat ditekan atau dipaksa demi kepentingan tertentu yang lebih luas.⁴³

Sehingga menurut Hamadi penyebab atau faktor dari timbulnya konflik adalah; *Pertama*, Akibat adanya perbedaan pendirian dan keyakinan antar individu ataupun kelompok yang dapat menimbulkan konflik keyakinan, dan masing-masing pihak berusaha mengalahkan pihak lawan dengan cara pemusnahan simbol-simbol dan ide-ide lawan, bahkan bisa sampai pada fisik. *Kedua*, adanya perbedaan kebudayaan bisa juga menimbulkan konflik yang lebih luas, karena kebudayaan mengikat lebih banyak orang. *Ketiga*, adanya perbedaan kepentingan dalam hal ini setiap individu atau kelompok akan memperjuangkan kepentingan mereka, sehingga dalam memperjuangkan kepentingan tersebut tidak jarang mereka harus bersaing dengan yang lainnya, dalam persaingan tersebut jika ada salah satu pihak yang melakukan hal yang tidak adil bisa saja akan menimbulkan konflik, tetapi dalam hal ini tidak semua persaingan bisa menyebabkan konflik. *Keempat*, adanya perbedaan ras, sehingga tiap kelompok atau individu bersikap resisten terhadap ras lain, akibatnya akan timbul sikap diskriminasi yang dapat menimbulkan konflik. *Kelima*, perbedaan jenis kelamin juga bisa menimbulkan konflik, seperti yang ada

⁴³ Hamadi B. Husein, "Ambon Manise: Sebuah Upayah Merajut Benang Kusut", dalam *Resolusi Konflik Islam Indonesia*, ed. Thoha Hamim dkk (Surabaya: LSAS dan IAIN Sunan Ampel Press, 2007), 211.

keatas mereka cenderung menikmati modernitas dan globalisasi ini, tetapi untuk tingkat kelas menengah kebawah mereka akan merasa terancam. Proses transformasi budaya dari masyarakat tradisional menuju ke *post-tradisional* menciptakan *disorientasi*, *dislokasi* dan *disfungsional* dari mekanisme masyarakat tradisional. Mereka merasa terancam dari segi ekonomi, psikologi dan politik terhadap identitas, bahkan keberadaan mereka, sehingga ujungnya akan muncul kecenderungan *primodialistis* yang mengarah pada sikap eksklusif dan pandangan agresif terhadap mereka yang berada di luar komunitas.

Kedua, adanya akumulasi kebencian dalam masyarakat. Ini dikarenakan adanya pemahaman agama eksklusif sehingga muncul dogma yang mengajarkan untuk menghindari orang-orang yang berada diluar agama mereka. Sehingga timbul saling tidak percaya, *perjudis* berakumulasi dan hubungan antar komunal semakin memanas.

Ketiga, masyarakat lebih banyak berada pada budaya kekerasan, dimana dengan mudah menganggap menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan.

Keempat, sistem pemerintahan yang otoriter dan tidak memberi kebebasan terhadap agama, dalam konteks Indonesia adalah sistem pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh

Kemungkinan-kemungkinan untuk eskalasi cukup tinggi. Ini dikarenakan adanya perjanjian-perjanjian baik itu bilateral maupun antar kawasan, sehingga ketika adanya konflik antar negara maka negara-negara yang lain akan mengambil tindakan, karena memiliki hubungan dengan masing-masing negara yang berkonflik.

B. Resolusi Konflik

Dalam pemecahan konflik sebenarnya ada cukup banyak istilah lain yang digunakan diantaranya adalah. *Pertama*, pencegahan konflik dimana tujuannya hanya untuk mencegah timbulnya kekerasan dalam konflik, yang *Kedua* penyelesaian konflik ini bertujuan untuk mengakhiri kekerasan melalui persetujuan perdamaian, dan yang *Ketiga* adalah pengelolaan konflik dimana bertujuan untuk membatasi atau menghindari kekerasan melalui atau mendorong perubahan pihak-pihak yang terlibat agar berperilaku positif. *Keempat*, adalah resolusi konflik dimana bertujuan untuk menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang relatif dapat bertahan lama diantara kelompok-kelompok yang berkonflik. *Kelima* transformasi konflik bertujuan untuk mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dengan mengalihkan kekuatan negatif dari sumber perbedaan ke kekuatan positif. Dari beberapa term tersebut ada dua istilah yang lebih sering digunakan dalam usaha menyelesaikan konflik yaitu resolusi konflik dan manajemen konflik. Kedua istilah tersebut sebagian orang mengartikanya sebagai sebuah term yang sama, tetapi sebenarnya keduanya memiliki perbedaan. Manajemen konflik seperti yang

diungkapkan oleh Robinson dan Clifford diartikan sebagai sebuah tindakan konstruktif yang di rencanakan, diorganisir, digerakkan, dan dievaluasi secara teratur atas semua usaha demi mengakhiri sebuah konflik.⁶²

Ada juga yang berpendapat bahwa manajemen konflik merupakan sebuah cara untuk menghindari konflik dengan intensitas yang lebih besar. Karena konflik sejatinya tidak bisa di hindari dan tidak bisa sepenuhnya dihilangkan. Sebelum konflik sosial, etnik atau agama itu meledak, penting sekali dilakukan pengelolaan konflik individual secara tepat, adil dan bijaksana sehingga bisa di selesaikan sesuai dengan aturan atau nilai yang berlaku tanpa adanya diskriminasi.⁶³

Sedangkan istilah resolusi konflik memang akhir-akhir ini lebih sering digunakan dari pada manajemen konflik, seperti yang diungkapkan oleh Morton Deutsch dalam bukunya *The Resolution of Conflict*, dijelaskan bahwa fokus-fokus dalam resolusi konflik merupakan sebuah kumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik, meneliti strategi terjadinya konflik, kemudian membuat resolusi terhadap sebuah konflik. Sehingga dalam resolusi konflik kita dapat terbantu untuk mengetahui jenis konflik, sifat konflik dan membedakan bentuk konflik apakah itu konstruktif ataupun destruktif, dan bisa menentukan strategi dalam menyelesaikan konflik.⁶⁴ Seperti juga yang di kemukakan oleh Deutch yang menulis dalam tradisi pemikiran George Simmel,

⁶²Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik (komunikasi lintas budaya masyarakat multikultur)* (Yogyakarta: LKIS,2005), 289.

⁶³Ahmad Nur Fuad, “Konflik Etnik dan Model Resolusi Konflik”, dalam *Resolusi Konflik Islam Indonesia*, ed. Thoha Hamim dkk (Surabaya: LSAS dan IAIN Sunan Ampel Press, 2007), 48.

⁶⁴Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik (komunikasi lintas budaya masyarakat multikultur)*, (Yogyakarta: LKIS,2005), 289.

perubahan-perubahan yang terjadi dalam pihak-pihak yang terlibat langsung dengan konflik dan juga masyarakat di sekitar wilayah terjadinya konflik.

Dalam konteks Indonesia Franz Magnis Suseno berpendapat bahwa dalam menciptakan perdamaian dan pengelolaan konflik yang bisa saja terjadi ada beberapa hal yang harus dilakukan.⁶⁹ *Pertama*, membangun kembali *rule of the law*, ini dipandang sangat penting dilakukan karena faktanya konflik yang terjadi dikarenakan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam melaksanakan hukum, sehingga akibatnya masyarakat seringkali melakukan pelaksanaan hukum sesuai dengan apa yang mereka inginkan, hal ini yang bisa menimbulkan konflik bahkan dapat menjadi sebuah faktor eskalasi sebuah konflik.

Kedua, *desentralisasi* kekuasaan politik dan ekonomi secara teratur dan terorganisir dengan baik. Franz memandang bahwa kesatuan negara ini tidak akan tercipta hanya dengan kita membuat sebuah negara kesatuan. Tetapi negara ini akan menjadi negara kesatuan dan stabil jika setiap wilayah, suku dan komunitas agama ingin menjadi bagian dari Indonesia. Sehingga untuk mewujudkan rasa kesatuan keadilan politik maupun ekonomi haruslah merata, setiap wilayah memiliki otoritas identitas dan pembangunan masing-masing.

⁶⁹ ⁶⁹Franz Magnis-Suseno, "Faktor-faktor Yang Mendasari Terjadinya Konflik Antara Kelompok Etnis dan Agama di Indonesia: Pencegahan dan Pemecahan", dalam *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*, ed. Dick van der Meij dan Farida Ishaja, terj. Suaidi Asy'ari (Jakarta: INIS Universiteit Leiden dan Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatuallah, 2003), 125-126.

Ketiga, membangun masyarakat yang demokratis dengan budaya yang demokratis. Franz menilai hal ini karena gagalnya masa orde baru dengan model pemerintahan yang otoriter untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, sebaliknya gaya orde baru yang otoriter menjadikan penyebab utama kemunduran masyarakat kedalam konflik kekerasan.

Keempat, pembangunan ekonomi yang merata. Sehingga masyarakat umum dapat merasakan keadilan dalam pembangunan tersebut. Ini dikarenakan faktor kesenjangan ekonomi memiliki potensi dalam melahirkan sebuah konflik, timbulnya prasangka akibat dari kesenjangan ini bisa menjadikan tindakan-tindakan yang dapat berujung pada konflik kekerasan.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial dalam ketentuan Pasal 1 menjelaskan tentang apa yang dinamakan penanganan konflik, pencegahan konflik dan penghentian konflik, disebutkan bahwa:

Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.

Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.

Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam

BAB III

DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Gresik

Gresik merupakan sebuah Kabupaten di pesisir utara Jawa Timur, yang berbatasan langsung dengan ibu kota Jawa Timur yaitu Kota Surabaya, tepatnya di utara Surabaya. Gresik dahulu terkenal sebagai sebuah kota bandar yang terkenal dan menjadi pusat perdagangan pada abad ke 11 M, tidak hanya menjadi pusat perdagangan antar pulau di Nusantara melainkan sudah meluas dari seluruh penjuru Negara.¹ Mulai dari pedagang Arab, Bengali, Siam, Campa sampai Gujarat mendarat di Gresik bertujuan untuk berdagang. Sehingga tidak heran di Gresik bisa dikatakan menjadi salah satu tempat agama Islam tumbuh dan berkembang di Indonesia, ini di buktikan dengan adanya makam Siti Fatimah binti Maimun sebagai makam Islam tertua di Indonesia.

Di kisahkan bahwa Siti Fatimah binti Maimun merupakan putri dari Syekh Mahmud Syah Alam atau dipanggil juga Maimun yang berasal dari Iran dan ibunya bernama Siti Aminah yang berasal dari Aceh.² Datang ke Gresik bersama dengan pengawal, selir dan gurunya bertujuan untuk berdagang dan menjalin hubungan

¹Kementrian Dalam Negeri, “Kabupaten Gresik”, <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/35/name/jawa-timur/detail/3525/gresik/> (Rabu, 18 April 2018, 03.00)

²Muhammad Samsul, “Siti Fatimah Binti Maimun”, <http://www.suaragresik.com/2013/11/siti-fatimah-binti-maimun-makam-panjang/> (Rabu, 18 April 2018, 03.00)

Belum banyak yang mengulas tentang Gresik pada masa Majapahit. Diantara dari beberapa prasasti yang di temukan penulis di komplek makam para Adipati adalah prasasti Karang Bogem. Ada yang mengatakan jika Prasasti ini di temukan di daerah Karang Bogem yang sekarang masuk dalam Kecamatan Bungah, tetapi menurut salah satu penjaga di komplek makam adipati tersebut prasasti ini ada sejak masa Majapahit di sana.⁷ Sehingga dalam hal ini penulis kurang mendapatkan data tentang kebenaran cerita prasasti ini, karena tidak ada petunjuk tertulis yang memastikan tentang prasasti ini. Tetapi mengenai kebenaran prasasti ini sudah ada sejak masa Majapahit bisa di lihat di bawah prasasti ada lambang dari kerajaan Majapahit yaitu matahari, teratai, tombak dan panah. Sehingga fakta bahwa Prasasti tersebut bersala dari masa Kerajaan Majapahit itu cukup kuat.

Gambar 3.2 Prasasti Karang Bogem



(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

⁷ Amron, *Wawancara*, Komplek Makam Adipati, 17 April 2018.

Prasasti tersebut berangka tahun 1387 M, ada tulisan Jawa kuno di kedua sisi prasasti terbut dan memuat nama Gresik dalam bahasa Jawa kuno, prasasti tersebut bertuliskan sebagai berikut

Iku wruhane para mantri ing tirah, aryya singga, pabayeman, aryya carita purut, patih lajer, wruhane yen ingong amegahaken karange patih tambak karang bogem, penangane, kidul lebu, panangane wetan sadawata anutug segara pisan, penangane kulon babatan demung wana, anutug segera pisan, pasawahane sajung babatan akikil, iku ta malerahaja den siddhigawe hana ta kawulaningong saking Gresik warigaluh ahutang sakti rong laksa genep sabisane hasikep rowang warigaluh luputata saking sidayu kapangarahan po hiya sakti dalem galangan kawolu anghaturakna tahiya bacan bobot sewu sarahi atombak sesine tambake saprakra kanahana tahiya ring pamuja.

Dan terjemahannya kurang lebih sebagai berikut:

Bahwa inilah surat yang harus diketahui oleh para Mantri Tirah, yang mulia Songga dari Pabayeman, yaitu yang mulia Carita dari Purut, Pati Lajer. Mereka hendaknya mengetahui bahwa kita telah menetapkan daerah seorang Pati Tambak Karang Bogem. Perbatasannya di sebelah selatang dengan sebidang ladang, di sebelah timur berbatasan dengan tanah yang mendatar dari laut. Adapun luasnya sawah satu jung dan penebasan satu kil. Demikian perbatasan tersebut, jangan di ganggu penetapan itu. Kemudian adalah seorang warga kami berasal dari Gresik, kerjanya nelayan, mempunyai utang sejumlah sau kati dua laksa, sedapat-dapatnya dia akan memungut bantuan sesama nelayan. Kini mereka, akan bebas dari tuntutan dari pihak Sidayu, tetapi mereka harus memenuhi tuntutan dari negeri. Di galangan ke delapan mereka harus membayar terasi (hacan, belacan) seberat seribu timbangan. Hasil tambak harus di berikan kepada kita. Kemudian pedagang angogogondhok yaitu para penyadap nira, mereka juga dibebaskan dari pembayaran arik pundik bermacam-macam cukai. Mereka sekarang harus dikenakan cukai pamuja (cukai kerajaan).⁸

Gresik pada masa Majapahit juga sudah mulai berkembang agama Islam, seperti yang sudah di jelaskan di atas, bahwa awal dari Islam tumbuh cukup pesat

⁸ Sobat Mabar, "Sejarah Nama Kota Gresik", <http://www.kaskus.co.id/thread/sejarah-nama-kota-gresik/> (Senin, 16 April 2018, 14.00)

Pada masa VOC, Afdeeling Gresik terdiri dari Kabupaten Gresik, Lamongan dan Sedayu dan berada pada jalur utama pos Deandels, pada masa itu perkembangan Gresik selanjutnya kalah pesat dibanding dengan Surabaya sehingga Gresik akhirnya di gabung dengan Surabaya menjadi Kabupaten Surabaya pada tahun 1934. Meskipun pada masa itu Gresik tetap menjadi daerah bandar pelabuhan, bahkan pihak kolonial mengembangkan daerah utara Gresik dengan membuat jalan lintas utara Gresik, yang membelah dari Kebomas sampai daerah Kecamatan Panceng, sampai sekarang jalan ini menjadi, jalan penghubung yang penting dari Jawa Timur sampai Jawa Tengah.

Jadi sampai awal kemerdekaan Gresik masih masuk pada daerah pemerintahan Kabupaten Surabaya.¹⁴ Sampai pada awal industrialisasi masuk di Gresik dengan didirikannya pabrik Semen Gresik pada tahun 1953, kehidupan ekonomi Gresik mulai tumbuh dengan masuknya investasi-investasi industri lain yang masuk Kabupaten Gresik, sehingga saat itu Kabupaten Surabaya di hapuskan dan pada tahun 1974 melalui PP 38/1974 tentang perubahan nama Kabupaten Surabaya pada 1 November 1974.¹⁵ Sehingga sampai sekarang Gresik menjadi Kabupaten tersendiri setelah penghapusan Kabupaten Surabaya

¹⁴ Gitgita, “Sejarah Asal Mula dan Nama Kota Gresik”, <http://sejarahunik.net/2018/01/15/sejarah-kota/sejarah-asal-mula-dan-nama-kota-gresik/> (Minggu, 15 April 2018, 03.00)

¹⁵“Bedah Buku Rekam Jejak DPRD Gresik, Esensi Penetapan Hari Jadi Kota Gresik”, <http://duta.co/2017/10/13/bedah-buku-rekam-jejak-dprd-gresik-esensi-penetapan-hari-jadi-kota-gresik/> (Minggu, 15 April 2018, 03.00)

fokus pada pengembangan ekonomi. Apalagi Gresik memang menjadi salah satu kota Industri dengan banyak pelabuhan, karena di dukung dengan letak geografis yang berada di samping selat Madura yang menjadi jalur pelayaran utama di Jawa Timur.

Gambar 3.3 Peta Kabupaten Gresik



(Sumber: Pemerintah Kabupaten Gresik)

Letak Gresik yang berada di daerah pesisir menjadikan Gresik memiliki curah hujan yang tergolong sedang, khususnya yang berada di daerah utara. Sehingga wilayah Gresik bisa dikatakan cukup panas, apalagi ketika masuk waktunya musim kemarau Gresik bagian utara sangat jarang hujan, bahkan bisa 2-3 bulan tidak ada hujan sama sekali. Meskipun begitu Gresik utara karena banyak sekali pegunungan kapur yang terbentang mulai dari Kecamatan Kebomas sampai Kecamatan Panceng

menjadikan Gresik memiliki daerah tampungan air alami, karena adanya gunung kapur yang notabnya merupakan spons alami penyerap air, sehingga air tertampung di bawah gunung tersebut. Gresik juga dialiri sungai Bengawan Solo yang muarannya ada di Gresik. menjadikan Gresik memiliki banyak sungai-sungai dari pecahan anak sungai Bengawan Solo, sehingga jika dilihat dari atas wilayah Gresik utara terpisah dengan batas Bengawan Solo seperti pada batas Kecamatan Manyar dan Kecamatan Bungah yang dipisah dengan aliran Bengawan Solo. Sedangkan di pulau Bawean merupakan pulau memiliki kontur tanah berbukit dengan beberapa pulau-pulau kecil di sekelilingnya.

Sedangkan di Gresik bagian selatan kondisi tanahnya agak berbeda dengan Utara, karena memang letaknya yang bukan di daerah pesisir melainkan sudah masuk di daerah tengah, sehingga cocok sekali digunakan untuk berkebun ataupun digunakan sebagai lahan persawahan. Ini juga karena curah hujan disana agak lebih tinggi dibanding dengan wilayah Gresik utara. Berikut adalah tabel rata-rata curah hujan di Gresik.

Tabel 3.1 Rata-rata Hujan di Kabupaten Gresik

Bulan	Rata-rata Curah Hujan			
	2013	2014	2015	2016
Januari	266	350	266	224
Februari	238	224	280	308
Maret	308	294	252	266
April	266	294	252	224
Mei	252	182	266	266

Gresik, yang memang yang di butuhkan adalah karyawan atau pegawai dengan minimal tingkat pendidikan akhir di SMA. Berikut adalah prosentase tingkat pendidikan dari total seluruh jumlah penduduk.

Tabel 3.2 Prosentase Tingkat Pendidikan Dari Total Jumlah Penduduk

Prosentase Tingkat Pendidikan di Kabupaten Gresik					
No	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah	%
1	Belum Sekolah	132.149	136.518	268.667	20%
2	Belum Tamat SD	50.878	47.661	98.539	7.5%
3	SD	169.266	192.808	362.074	27%
4	SMP	110.429	107.597	218.026	16%
5	SMA	159.591	130.661	290.252	22%
6	D1/D2	661	1.004	1.665	0.1%
7	D3	4.169	6.541	10.710	0.8%
8	D4/S1	28.901	28.785	57.686	4.3%
9	S2	2.048	1.080	3.128	0.2%
10	S3	53	26	79	0.006 %
Jumlah				1.313.826	

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik)

Sedangkan untuk keberagaman keagamaan masyarakat di Kabupaten Gresik mayoritas beragama Islam dengan Prosentase sekitar 98% dari total jumlah penduduk dengan jumlah 1.296.498. memang tidak mengherankan karena memang Gresik sebagai salah satu wilayah awal perkembangan Islam yang cukup pesat. Meskipun begitu Gresik juga tetap menjadi sebuah Kabupaten yang plural dibuktikan dengan

adanya juga agama-agama lain dan beberap aliran kepercayaan yang ada di Gresik. Berikut adalah prosentase keagamaan masyarakat di Kabupaten Gresik.

Tabel 3.3 Prosentase Keagamaan Masyarakat di Kabupaten Gresik

Prosentase Keagamaan Masyarakat di Kabupaten Gresik					
No	Agama	L	P	Jumlah	%
1	Islam	625.475	644.023	1.296.498	98%
2	Kristen	5.577	5.631	11.208	0.8%
3	Katolik	1.596	1.575	3.172	0.2%
4	Buddha	350	354	704	0.05%
5	Hindu	1.022	1.002	1.024	0.07%
6	Konghucu	4	3	7	0.0005%
7	Lainnya	121	92	213	0.01%
Jumlah				1.313.826	

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik)

Sedangkan untuk pekerjaan penduduk di Kabupaten Gresik mayoritas menjadi karyawan swasta, karena sekarang dengan banyaknya kemajuan industri di wilayah Gresik masyarakat banyak yang beralih menjadi karyawan di pabrik atau perusahaan-perusahaan yang ada di Gresik khususnya anak-anak muda di Gresik lebih dominan mereka menjadi karyawan di pabrik di banding bertani maupun yang lainnya. Ini juga dikarenakan masyarakat Gresik menilai penghasilan menjadi karyawan lebih menjanjikan dibanding dengan bertani maupun yang lainnya.

Kondisi ini dimulai dari sejak masuknya industri di Kabupaten Gresik pada tahun 1957, dengan industri pertama yang berkembang adalah PT. Semen Gresik yang sekarang menjadi PT. Semen Indonesia. Sejak saat itu Gresik berubah menjadi kota industri yang terus berkembang sampai sekarang. Berikut jumlah penduduk dari jenis pekerjaan yang tercatat.

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Belum Bekerja	297.717	23	Mengurus Rumah Tangga	188.685
2	Pelajar/Mahasiswa	229.994	24	pensiunan	2.526
3	PNS	11.975	25	TNI	2852
4	POLRI	922	26	Perdagangan	360
5	Petani/Pekebun	139.558	27	Peternak	52
6	Nelayan/Perikanan	7.888	28	Industri	104
7	Konstruksi	76	29	Transportasi	44
8	Karyawan Swasta	232.693	30	Karyawan BUMN	1.772
9	Karyawan BUMD	117	31	Karyawan Honorer	273
10	Buruh Harian Lepas	11.197	32	Buruh Tani/Kebun	425
11	Buruh Nelayan/Perikanan	76	33	Buruh Ternak	12
12	Pembantu Rumah Tangga	250	34	Tukang Batu	191
13	Tukang Kayu	35	35	Mekanik	6
14	Pendeta	35	36	Pastor	1
15	Wartawan	18	37	Dosen	584
16	Guru	13.320	38	Pengacara	6
17	Arsitek	8	39	Notaris	9
18	Dokter	476	40	Bidan	543
19	Perawat	780	41	Apoteker	49
20	Pelaut	389	42	Sopir	419
21	Pedagang	10.565	43	Perangkat Desa	289
22	Wiraswasta	144.260	44	Lainnya	25.672
Jumlah			1.313.826		

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik)

D. Lambang Daerah Kabupaten Gresik.

Gambar 3.4 Lambang Daerah Kabupaten Gresik



(Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik)

1. Dasar Lambang Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor: 3 Tahun 1975.

2. Arti Lambang Daerah¹⁹

- a. Lambang daerah merupakan cermin yang memberikan suatu deskripsi/gambaran tentang keadaan daerah.
- b. Segi lima, melambangkan Pancasila yang melandasi sosiokultural, historis dan aktifitas ekonomi.

¹⁹ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, *Profil Kabupaten Gresik Tahun 2017*, (Gresik: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, 2017), i.

- c. Warna kuning, melambangkan keluhuran budi kebijaksanaan, sedangkan warna garis tepi hitam melambangkan sifat tetap teguh dan abadi.
- d. Kubah masjid, melambangkan agama yakni agama Islam.
- e. Rantai tanpa ujung pangkal, melambangkan kesatuan dan persatuan.
- f. Segitiga sama kaki sebagai puncak dari kubah masjid, melambangkan bahwa tiada kekuasaan tertinggi selain Tuhan yang maha kuasa.
- g. Makna rantai berjumlah 45 (empat puluh lima), melambangkan bahwa tahun 1945 merupakan tonggak sejarah tahun peralihan zaman dari masa kolonial penjajahan ke zaman kemerdekaan Indonesia yang jaya dan kekal.
- h. Gapura berwarna abu-abu muda, melambangkan suatu pintu gerbang pertama masuk dalam suatu tempat/daerah sebagaimana penghubung antara daerah luar dan dalam daerah.
- i. Tujuh belas lapisan batu, melambangkan tanggal tujuh belas agustus saat pencetusan revolusi kemerdekaan.
- j. Cerobong asap, melambangkan bahwa Kabupaten Gresik adalah daerah pengembangan industri, tidak hanya sebagai lambang kota semen, tetapi sebagai kota industri yang letaknya amat strategis bila di tinjau dari persilangan baik darat maupun laut dan udara.
- k. Perahu layar, ikan, laut dan tanah melambangkan bahwa mata pencaharian rakyat Kabupaten Gresik adalah sebagai nelayan,

sedangkan tanah melambangkan Gresik adalah wilayah yang berdataran rendah.

- l. Ombak laut berjumlah delapan, melambangkan bahwa bulan agustus tercetusnya kemerdekaan Indonesia.
- m. Sesanti atau semboyan yang tertulis dalam lambang Kabupaten Gresik “Satya Bina Kertaraharja” memiliki arti “kesetiaan membina kesejahteraan”, ini artinya bahwa Kabupaten Gresik dengan titik tolak pertanian, perikanan, perindustrian dan pendidikan harus bekerja keras untuk tercapainya kesejahteraan bersama berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

E. Pemerintahan Kabupaten Gresik

Pemerintahan Kabupaten Gresik di pimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati, dengan dibantu jajaran pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Gresik. Bupati pertama Gresik bernama Adipati Poesponegoro, tetapi belum ada yang tau sampai kapan Adipati Poesponegoro memimpin Gresik, karena tidak ada catatan sejarah yang lengkap mengenai hal ini. Tetapi penulis mendapatkan data Bupati dan Wakil Bupati yang pernah memimpin Gresik dari masa kolonial sampai sekarang dalam tabel berikut.

Tabel 3.5 Bupati dan Wakil Bupati Gresik

Bupati dan Wakil Bupati Gresik		
Nama Bupati	Nama Wakil Bupati	Periode menjabat
RPPA Soerjowinoto	-	1934-1937
R.T.A Moesono	-	1937-1948
Bambang Soeparto	-	1948-1953
R. Widagdo	-	1953-1960
R. Soekarso	-	1960-1968
Soesanto Bangun Nagoro, SH	-	1968-1973
Ltkol (L) Soefelan	-	1973-1978
Ltkol (L) Wasiadji, SH	-	1978-1984
Kolonel (MAR) H. Amiseno	-	1984-1989
Kolonel (L) Djunansah	-	1989-1994
Kolonel (L) H. Soewarso	-	1994-1999
Drs. K.H Robbach Ma'sum, MM	Ir. Sambari Halim Radianto	2000-2005
Drs. K.H Robbach Ma'sum, MM	H. Sastro Suwito	2005-2010
Dr. Ir. Sambari Halim Radianto	Drs. H. Muhammad Qosim	2010-2015
Dr. Ir. Sambari Halim Radianto	Drs. H. Muhammad Qosim	2015-2019

(Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik)

Untuk pegawai negeri sipil yang berada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Gresik tercatat total berjumlah 9.234 yang tersebar di semua Dinas atau Instansi di Kabupaten Gresik. Yang terbanyak untuk PNS di lingkungan pemerintahan Kabupaten Gresik pendidikan akhirnya adalah S1 sekitar 55% dari

total seluruh PNS yang ada di Kabupaten Gresik. Berikut adalah tabel jumlah PNS menurut jenis kelamin dan pendidikan terakhir.

Tabel 3.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil

pendidikan	Jenis kelamin		Jumlah	%
	L	P		
SD	92	10	102	1,10%
SMP	188	25	213	2,30%
SMA	1.147	730	1.877	20,30%
D I	12	144	156	1,60%
D II	163	299	462	5%
D III	201	508	709	7,60%
D IV	14	18	32	0,34%
S1	2.213	2.877	5.090	55,10%
S2	371	201	572	6,10%
S3	0	1	1	0,01%
Jumlah	4.401	4.813	9.234	

(Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik)

Sedangkan untuk unit Dinasnya, Kabupaten Gresik memiliki 50 unit Dinas dan Instansi di bawah pemerintahan Kabupaten Gresik, yang berfungsi membantu Bupati dan Wakil Bupati.. Selain itu unit Dinas dan Instansi dibawah Pemerintahan Kabupaten Gresik juga membantu menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat.²⁰ Di bawah ini adalah daftar Dinas dan Instansi yang ada di Kabupaten Gresik.

²⁰ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, *Profil Kabupaten Gresik Tahun 2017*, (Gresik: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, 2017), 40.

Tabel 3.7 Dinas dan Instansi di bawah Pemerintah Kabupaten Gresik

No	Dinas/Instansi	No	Dinas/Instansi
1	Sekretariat Daerah	26	Dinas Tenaga Kerja
2	Sekretariat DPRD	27	Dinas Perhubungan
3	Dinas Pendidikan	28	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
4	Dinas Kesehatan	29	Dinas Kebudayaan, Pariwisata & Olahraga
5	Dinas Pekerjaan Umum	30	Dinas Koperasi dan UKMPP
6	Dinas Pertanian, Perkebunan & Kehutanan	31	Dinas Kelautan, Perikanan & Peternakan
7	DPPKAD	32	Bapelitbang
8	Dinas Sosial	33	Inpektorat
9	Badan Kepegawaian Daerah	34	Badan Penanaman Modal dan Perizinan
10	Badan Lingkungan Hidup	35	RSUD Ibnu Sina
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	36	BPPK
12	Badan Narkotika Nasional	37	Kantor Arsip & Perpustakaan
13	BKBPP	38	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
14	Kantor Ketahanan Pangan	39	Badan Pemberdayaan Masyarakat
15	Kantor Polisi Pamong Praja	40	Komisi Pemilihan Umum
16	Sekretariat Kopri	41	Kecamatan Duduk Sampean
17	Kecamatan Wringinanom	42	Kecamatan Kebomas
18	Kecamatan Driyorejo	43	Kecamatan Gresik
19	Kecamatan Kedamean	44	Kecamatan Manyar
20	Kecamatan Menganti	45	Kecamatan Bungah
21	Kecamatan Cerme	46	Kecamatan Sedayu
22	Kecamatan Benjeng	47	Kecamatan Dukun
23	Kecamatan Balong Panggang	48	Kecamatan Panceng
24	Kecamatan Ujung Pangkah	49	Kecamatan Sangkapura
25	Kecamatan Tambak	50	Dinas Informatika dan Informasi

(Sumber: Dinas Informatika dan Informasi Kabupaten Gresik)

Seperti halnya di daerah lain, Gresik juga ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berfungsi sebagai badan legislatif di samping eksekutif dan yudikatif. DPRD berfungsi sebagai pendengar aspirasi dan pengaduan dari masyarakat, seperti halnya dalam kasus MTA dan warga NU di Gresik pada tahun 2013-2014 DPRD Gresik ikut dalam mengambil tindakan dengan melakukan *hearing* atau mendengar pendapat dari setiap pihak yang berkonflik yang selanjutnya DPRD akan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bupati dan ikut dalam mengawasi proses penyelesaian. Pada periode 2015-2019 kursi DPRD Kabupaten Gresik ada 50 kursi yang diisi oleh 7 Partai yaitu PAN, Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, Golkar, Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan. Berikut tabel jumlah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Gresik.

Tabel 3.8 DPRD Kabupaten Gresik

No	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik			
	Partai	L	P	Jumlah
1	Partai Kebangkitan Bangsa	7	1	8
2	Partai Demokrat	5	1	6
3	Partai Golkar	9	2	11
4	PDI Perjuangan	7	0	7
5	PPP	6	1	7
6	PAN	5	0	5
7	Partai Gerindra	5	1	6
Jumlah		44	6	50

(Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik)

F. Gambaran Umum NU dan MTA

Gambaran umum ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai NU dan MTA, sehingga mempermudah pembaca dalam memahami dua organisasi keagamaan tersebut, sehingga pembaca akan lebih mudah dalam memahami perbedaan antara kedua organisasi keagamaan tersebut. Penjelasannya sebagai berikut.

1. Nahdlatul Ulama

Merupakan sebuah organisasi keislaman yang berdiri pada 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1344 H di Surabaya. Nahdlatul Ulama berdiri sebagai sebuah respon atas perkembangan politik islam yang ada di Timur Tengah, yang pada saat itu Raja Syarif Husein yang berkuasa di Hijaz dan berpaham sunni di taklukan oleh Abdul Aziz bin Saud yang berpaham Wahabi pada tahun 1924. Saat itu terjadi pergolakan politik yang cukup tajam, karena secara otomatis setelah Abdul Aziz bin Saud memerintah dia lantas melarang seluruh amaliah-amaliah sunni yang selama ini dipraktikkan di tanah Arab.²¹

Abdul Aziz bin Saud saat itu juga ingin memperluas pengaruhnya, tidak hanya di daerah Arab melainkan ke seluruh dunia dengan dasar mengembalikan kebangkitan islam pasca runtuhnya Kesultanan Turki Usmani, sehingga berencana untuk menggelar muktamar khilafah di Makkah dengan tujuan untuk membahas penerus khilafah yang terputus. Seluruh negara islam dan negara dengan mayoritas

²¹ Soelaiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU Sejarah Istilah Amaliah Uswah* (Surabaya: Khalista, 2007), 2.

penduduknya muslim mendapat undangan untuk menghadiri muktamar tersebut, termasuk Indonesia. Pada saat itu delegasi Indonesia awlnya berjumlah 3 orang yaitu H.O.S Cokroaminoto mewakili Serikat Islam, K.H Mas Mansur mewakili Muhammadiyah dan K.H Wahab Hasbuallah mewakili kalangan pesantren. Tetapi usul mengenai nama K.H Wahab Hasbuallah dihapus, karena dianggap tidak mewakili sebuah organisasi Islam yang resmi.²²

Atas dasar kekecewaan keputusan delegasi untuk menghadiri muktamar khilafah di Makkah, kalangan pesantren akhirnya mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membahas hal ini, karena di anggap penting sekali untuk segera mendirikan sebuah organisasi keislaman yang mewakili orang-orang pesantren. Sehingga pada 31 Januari 1926 dibentuklah komite Hijaz sekaligus meresmikan organisasi islam Nahdlatul Ulama dengan K.H Hasyim Asy'ari sebagai Rais Aam yang pertama sebagai pucuk pimpinan tertinggi.

Pada 1928 utusan NU diterima oleh Raja Abdul Aziz bin Saud, dan menyampaikan agar Raja Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi tetap menghormati praktik-praktik mazhab. Dan tuntutan tersebut disambut baik oleh Raja Abdul Aziz bin Saud dengan catatan praktik-praktik tersebut harus sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah.²³ Reaksi terhadap pembaharuan-pembaharuan yang ada di Indonesia dan kondisi politik internasional, menjadi sebuah landasan

²² Ibid.

²³ Abdul Khalik Ridwan, *NU dan Bangsa 1914-2010 Pergulatan Politik dan Kekuasaan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 44.

dimana NU berdiri, dengan tujuan sebagai wadah bagi kalangan pesantren untuk mempertahankan tradisi-tradisi yang selama ini ada di Indonesia.

Pada awal berdirinya NU, masa itu Indonesia masih dalam kondisi terjajah oleh Belanda melalui VOC, dan NU sebagai sebuah organisasi baru diakui oleh pemerintah Hindia Belanda pada Februari 1930. Dan pertama kali NU memiliki cabang diluar pulau Jawa pada Mukhtamar ke 5 diplokanirkan berdirinya cabang NU di Martapura, Kalimantan Selatan.²⁴ Ada 2 hal pokok yang ditulis oleh K.H Hasyim Asy'ari sebagai prinsip dasar organisasi, yaitu Kitab Qanun Asasi dan I'tiqad Ahlusunnah Wal Jamaah. Sehingga kedua kitab tersebut menjadi rujukan dasar bagi NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang keagamaan, sosial maupun politik.²⁵

Dari awal berdiri NU terus ikut berperan besar dalam kemerdekaan bangsa Indonesia, yang pada masa itu masih terjajah. NU juga berperan besar dalam perjuangan warga Indonesia pada pertempuran 10 November di Surabaya melawan sekutu yang datang bertujuan untuk menguasai kembali Indonesia yang baru saja merdeka pada 17 Agustus 1945. Kalangan pesantren saat itu ikut mengirimkan pasukan Hisbuallah dalam peperangan yang menewaskan salah satu Jenderal besar pasukan sekutu tersebut, yaitu Jenderal Mallaby.

²⁴ Aguk Irawan M.N, *Penakluk Badai Novel Biografi K.H Hasyim Asy'ari* (Depok: Global Media Utama), 313.

²⁵ <https://achmadsyauqie.files.wordpress.com/2012/11/resume-sejarah-dan-tausiyah-nu.pdf> (Rabu, 09 Mei 2018), 2.

Sebelumnya K.H Hasyim Asy'ari selaku pucuk pimpinan NU saat itu mengundang para ulama dan konsul-konsul NU se Jawa-Madura pada 21-22 Oktober untuk mengambil tindakan atas apa yang sedang terjadi di Indonesia, yang pada akhirnya K.H Hasyim Asy'ari mengeluarkan sebuah fatwa jihad tentang kewajiban setiap muslim Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan.

Keikutsertaan NU dalam perjuangan kemerdekaan tidak hanya pada sebatas resolusi *jihad* yang bertujuan untuk mengobarkan semangat perlawanan terhadap penjajahan, NU disini juga ikut dalam proses perumusan persiapan kemerdekaan dalam sidang BPUPK dan persiapan-persiapan yang lainnya, diwakili oleh K.H Wahid Hasyim. Dalam perkembangan selanjutnya NU masuk dalam dunia politik awalnya menjadi bagian dari Masyumi sampai pada 1952 NU memutuskan untuk keluar dari Masyumi, ini dikarenakan tokoh-tokoh NU berpandangan bahwa NU tidak lagi mendapatkan tempat di Masyumi, dengan tidak adanya orang-orang NU yang diangkat menjadi Menteri dalam 3 kali periode Kabinet saat itu, yaitu pada Kabinet Halim (21 Januari 1950-6 September 1950), Kabinet Natsir (6 September 1950-27 April 1951, dan Kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April 1952). Selain itu sentimen-sentimen anti-Masyumi dan keuntungan NU masuk dalam Masyumi mulai dipertimbangan sehingga mempercepat proses keluarnya NU dari Masyumi.²⁶

²⁶ Abdul Khalik Ridwan, *NU dan Bangsa 1914-2010 Pergulatan Politik dan Kekuasaan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 109.

Syamsul Arifin, K.H Abdurrahman Wahid sebagai ketua PBNU dan K.H Achmad Shidiq sebagai Rais Am Syuriah PBNU. Dalam Mukhtamar ini juga NU sebagai organisasi yang telah lepas dari urusan politik praktismemutuskan bahwa negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sebuah perjuangan yang final, dan NU sebagai sebuah organisasi yang aktif dalam perjuangan bangsa warga NU harus senantiasa mewnjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, dan Pancasila diterima sebagai asas sebagaimana hasil keputusan Mukhtamar tentang deklarasi hubungan islam dan Pancasila.³⁰

Sejak saat itu sampai sekarang NU menjadi sebuah organisasi keagamaan yang fokus terhadap masalah-masalah sosial keagamaan, dan berperan aktif dalam menjaga keutuhan NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Meskipun dikenal sebagai sebuah organisasi yang mewakili kalangan islam tradisional, NU dalam perkembanganya tidak menutup diri terhadap modernitas dan perkembangan zaman, sehingga tidak hanya masalah agama saja masalah sosial juga mendapat perhatian.

Pembaharuan-pembaharuan pemikiran banyak dilakukan oleh kaum muda NU baik di lingkungan internal maupun eksternal NU, ini juga mendapat dorongan dari berkembangnya wacana islam kontemporer yang digerakkan oleh Gus Dur dan kawan-kawan sehingga banyak memotivasi kaum-kaum muda NU.

³⁰ Abdul Khalik Ridwan, *NU dan Bangsa 1914-2010 Pergulatan Politik dan Kekuasaan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 268-273.

Diantaranya di Yogyakarta di bentuk Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS), di Surabaya di bentuk Lembaga Studi Agama dan Demokrasi (eLSAD), dan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) di Jakarta. Mereka berupaya menjalin hubungan baik dan mengembangkan jaringan baik dari kalangan NU maupun kalangan di luar NU baik muslim maupun non-muslim.³¹

Di bidang pendidikan NU banyak sekali memiliki lembaga-lembaga pendidikan dibawah naungan Ma'arif NU dan ribuan pesantren yang tesebar di seluruh daerah di Indonesia, selain itu pengembangan pendidikan tidak hanya berhenti pada tingkat dasar, NU dan banyak pesantren-pesantren milik tokoh-tokoh NU juga mengembangkan pendidikan tinggi. Beasiswa-beasiswa juga diberikan oleh NU bagi yang berminat untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar negeri.

Dalam bidang sosial masyarakat NU juga berperan aktif dalam membantu dan membangun hubungan sosial yang baik dengan berbagai golongan, tidak berhenti pada golongan NU saja, golongan di luar NU baik muslim maupun non-muslim NU tetap menjaga hubungan baik, ini merupakan sebagaian komitmen NU untuk menjaga keutuhan NKRI dan bagian dari komitmen NU mengahragai adanya pluralitas, dalam hal ini seperti hasil dari Mukhtamar ke-29 di Cipasung

³¹ Shonhadji Soleh, "Konflik Setengah Hati dan Integrasi Tanpa Konsesi: Kajian Tentang Gerakan Pembaruan Nahdlatul Ulama", dalam *Resolusi Konflik Islam Indonesia*, ed. Thaha Hamim dkk (Surabaya: LSAS dan IAIN Sunan Ampel Press, 2007), 229.

Tasikmalaya pada 4 Desember 1994, pada Bab Ke-5 tentang wawasan Nahdlatul Ulama tentang pluralitas pada poin ke 1,2 dan 6 berbunyi sebagai berikut.³²

- (1) Nahdlatul Ulama sepenuhnya menyadari kenyataan kemajemukan (pluralitas) masyarakat Indonesia dan meyakini sebagai sunnatullah. Pluralitas masyarakat yang menyangkut kemajemukan agama, etnis, budaya, dan sebagainya adalah sebuah kenyataan dan rahmat dalam sejarah Islam itu sendiri sejak zaman Rasulullah.
- (2) Islam memberikan jaminan dan toleransinya dalam memelihara hubungan bersama dengan meletakkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kebersamaan dan kejujuran dalam memelihara kehidupan bersama, dengan tidak mengingkari adanya perbedaan dalam hal tertentu. Dalam wawasan yang demikianlah Nahdlatul Ulama meletakkan tata hubungan dan tiga bentuk ukhuwa di atas.³³
- (1) Lebih dari itu, *ukhuwah* memang tidak hanya memerlukan keseragaman tetapi juga memerlukan kesediaan untuk “bersatu dalam keaneragaman”. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, ketiga bentuk ukhuwah tersebut hendaknya dilakukan secara proposional, seimbang, dan menurut tuntunan syariat.

Untuk melaksanakan hal ini NU memiliki berbagai badan otonom yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu sesuai dengan otonom masing-masing, dan merupakan bagian sayap NU.³⁴ Diantaranya GP Ansor, IPNU, IPPNU, Muslimat NU, Fatayat, PMII dan lain-lain. Selain badan otonom NU juga memiliki banyak organisasi pemuda dan masyarakat di luar badan otonom NU, organisasi-organisasi tersebut merupakan sebuah wadah ekspresi bagi warga NU untuk menunjukkan ekspresi mereka di ruang publik, dan juga secara aktif ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial,

³² Abdul Khalik Ridwan, *NU dan Bangsa 1914-2010 Pergulatan Politik dan Kekuasaan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 481-484.

³³ tiga *Ukhuwah* maksudnya adalah *Ukhuwa Islamiyah* yaitu hubungan sesama muslim, *Ukhuwa Wathaniyah* yaitu tata hubungan yang menyangkut hal-hal yang bersifat mu’amalah (kemasyarakatan, kebangsaan/kenegaraan), *Ukhuwa Basyariyah* yaitu hubungan antar manusia yang berkembang atas dasar rasa kemanusiaan yang bersifat universal, meliputi kesamaan martabat kemanusiaan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, adil dan damai.

³⁴ Soelaiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU Sejarah Istilah Amaliah Uswah* (Surabaya: Khalista, 2007), 34.

seperti LAZIZNU (Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama), Kopdarnas sebuah wadah bagi pemuda-pemuda dan santri-santri NU untuk berkumpul dan membuat kegiatan-kegiatan sosial.

Di Kabupaten Gresik sendiri NU sudah mengakar kuat sejak lama, karena Gresik juga termasuk dari wilayah basis warga NU, dengan mayoritas umat muslim di Gresik merupakan warga NU, sehingga tradisi dan amaliyah-amaliyah ala NU sudah menjadi hal yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Berbagai lembaga pendidikan mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai perguruan tinggi di bawah badan-badan otonom NU seperti Maarif dan Muslimat NU, selain itu banyak pula pondok-pondok pesantren yang tersebar di wilayah Gresik dibawah naungan kyai-kyai NU, bahkan banyak diantaranya sudah memiliki sekolah-sekolah formal dari PAUD sampai tingkat perguruan tinggi seperti Pondok Pesantren Qomaruddin yang berada di Kecamatan Bungah, Pondok Pesantren Mambaus Shalihin yang sekarang di bawah naungan K.H Masbuhin Faqih yang berada di Desa Suci Kecamatan Manyar, Pondok Pesantren Daruttaqwa yang berada juga di Suci Kecamatan Manyar dan masih banyak lagi Pondok-pondok Pesantren yang juga memiliki sekolah-sekolah formal selain pendidikan Diniyah dan Salaf.

Jika dinilai di Gresik lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan NU berhasil dalam mengembangkan kualitas pendidikan yang tidak kalah dari sekolah-sekolah negeri. Bahkan beberapa sekolah di bawah Maarif NU ini sudah

berhasil menjuarai berbagai *event* internasional dan mendapatkan predikat sekolah bertaraf internasional karena berhasil membangun relasi kerjasama dengan berbagai instansi dan perguruan tinggi luar negeri. Dan usaha-usaha untuk terus mengembangkan pelayanan sosial maupun pendidikan yang dilakukan oleh NU di Kabupaten Gresik secara masif terus dikembangkan. Yang terbaru Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Gresik mulai merintis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama.

2. *Majelis Tafsir Al-Qur'an*

Majelis Tafsir Al-Qur'an atau biasa disingkat dengan nama MTA, berdiri di Surakarta pada tanggal 19 September 1972. Didirikan oleh Abdullah Thufail Saputra. Majelis Tafsir Al-Qur'an didirikan dengan tujuan untuk merubah kondisi umat, karena melihat kondisi umat islam saat itu pada dekade 60-an dan awal dekade 70-an yang dipandang berada dalam keadaan yang dianggap terpuruk, sehingga Abdualah Thufail Saputra memiliki pemikiran bahwasanya cara untuk merubah keadaan umat adalah memperbaiki ajaran umat islam agar kembali kepada Al-Qur'an dan Hadits, dan memiliki pemahaman yang baik terhadap Al-Qur'an.³⁵ Keadaan ini ditemukan oleh Abdualah Thufail Saputra saat dia berkeliling Indonesia, karena profesinya saat itu sebagai seorang pedagang.

Pola dakwah dan organisasi Majelis Tafsir Al-Qur'an bisa digolongkan sebagai islam puritan dimana semangat pergerakan organisasi mereka adalah

³⁵ <http://mta-online.com/sekilas-profil/> (Kamis, 28 Juni 2018, 14:10).

kantot cabang yaitu di Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas dan di Kecamatan Menganti.

Tetapi MTA perwakilan Gresik masih menjadi kepanjangan tangan dari MTA Surakarta sehingga belum bisa dianggap sebagai lembaga keagamaan resmi, karena belum memiliki izin dari Majelis Ulama Kabupaten Gresik. Sehingga kegiatan MTA di Gresik hanyalah kegiatan-kegiatan dakwah untuk lingkungan sendiri dan belum bisa untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan di Kabupaten Gresik. Dalam model dakwah mereka MTA di tingkat cabang harus mengikuti aturan sesuai dengan aturan dari MTA pusat di Surakarta sehingga cara dakwah dan isi dari pengfajian tersebut harus sesuai dengan MTA pusat. Sehingga bisa dikatakan model lembaga mereka terstruktur dengan rapi. Pengajian dilakukan pada hari Kamis dan Ahad pagi, sekarang MTA dipimpin oleh Ahmad Sukina, dan sekarang sudah memiliki 539 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.³⁸

³⁸ <http://mta-online.com/sekilas-profil/> (Kamis, 28 Juni 2018, 14:30).

Zainul Hamdi dan Muktafi menjelaskan, mereka yang memiliki sikap eksklusif memiliki pemahaman bahwa yang berbeda dengan dirinya dianggap sebagai sebuah kesesatan dan bentuk penyimpangan dari fungsi kodrati, sehingga harus dipertobatkan, jika tidak bisa maka harus disingkirkan.³ Pemahaman akan teks suci yang dipahami hanya sebatas tekstual menjadi penyebab dari munculnya paham eksklusif ini, selain itu sikap kurang terbuka menjadikan dirinya semakin tertutup dan mengangap yang diluar dari golongannya adalah salah.

Konflik antara MTA Perwakilan Kabupaten Gresik dan warga Nahdlatul Ulama di Kabupaten Gresik, merupakan salah satu dari konflik intern agama yang berangkat dari pemahaman keagamaan yang berbeda antara keduanya yang tidak dapat dimanajemen dengan baik. Konflik ini terjadi sekitar 4 tahun yang lalu, sekitar tahun 2013-2014. Tetapi sejak tahun-tahun sebelumnya sudah muncul benih-benih penyebab konflik.

MTA di Kabupaten Gresik diketahui belum memiliki izin dari instansi-instansi terkait dengan izin berdirinya sebuah lembaga keagamaan, seperti ke MUI Kabupaten Gresik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan Kesbangpol Kabupaten Gresik. MTA Perwakilan Kabupaten Gresik hanya mengantongi izin pendirian dari Bupati Gresik. Hal ini memancing reaksi dari sebagian masyarakat Kabupaten Gresik. Salah satu media online menyebutkan bahwasannya MTA tidak pernah ada izin kepada warga setempat untuk mendirikan sebuah kantor perwakilan cabang di Kelurahan Sidomoro, melainkan mereka hanya

³ Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi, "Intoleransi, Ujaran Kebencian, Hingga Dialog Antar Iman", dalam *Wacana dan Praktik Pluralisme Keagamaan di Indonesia*, ed. Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi (Jakarta: Daulat Press, 2017), 24.

dalam asosiasi tersebut memiliki 2 kelas kelas yang memiliki kewenangan dan kelas yang tidak memiliki kewenangan.⁷ Jika kewenangan yang dimiliki bisa digunakan dengan baik maka tidak akan timbul sebuah konflik, tapi jika kewenangan tersebut digunakan untuk hal yang kurang tepat maka bisa saja akan menimbulkan sebuah konflik sosial. Pentingnya menimbang kebijakan sebelum disahkan menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh otoritas yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan kebijakan tersebut, potensi gesekan sosial harus juga dipertimbangkan.

Pernyataan Herman dalam media online juga menyebutkan bahwa sebenarnya MTA Perwakilan Gresik didirikan di Jl. Veteran, tetapi karena sebab yang sama mereka diusir oleh warga dan pindah di Kelurahan Sidomoro. Herman juga menambahkan bahwa sebelumnya banyak warga yang simpati dengan pengajian MTA, namun karena warga sudah mengetahui dan merasa ada yang salah dengan pengajian MTA maka warga mulai enggan untuk mengikuti pengajian MTA.⁸ Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Naim Ubaidillah salah satu warga Kelurahan Sidomoro, pak Naim menjelaskan kalau dulu memang ada beberapa warga sekitar Sidomoro dan dari beberapa daerah di Kabupaten Gresik ikut pengajian MTA, tetapi sejak warga mulai mengetahui apa yang

⁷ Ralf Dahrendorf, *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri*, Terj. Ali Mandan (Jakarta: Rajawali, 1986), 194-195.

⁸ Mohammad Ridwan, "Warga Kebomas Gresik Resahkan Pengajian MTA", <http://lensaIndonesia.com/2012/12/06/warga-kebomas-gresik-resahkan-pengajian-mta/> (Rabu, 18 April 2018, 05.00)

Sikap eksklusif MTA ini mendorong keresahan warga semakin tinggi, sehingga Gerakan Pemuda Ansor mengambil sikap dengan menuntut Pemerintah Kabupaten Gresik untuk segera menutup MTA. Pada hari Selasa 10 Desember 2013, GP Ansor Gresik mengadakan rapat internal di Kantor PCNU Gresik, membahas permasalahan keberadaan MTA di Kabupaten Gresik, dalam rapat tersebut diputuskan langkah awal GP Ansor akan membuat spanduk penolakan terhadap MTA yang akan di pasang disetiap PAC GP Ansor di hampir seluruh wilayah Gresik. Bertujuan sebagai tekanan awal dan melihat respon dari MTA maupun Pemkab Gresik.¹⁷

Tindakan GP Ansor dan reaksi-reaksi dari tokoh NU merupakan sebuah bentuk protektifitas, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun rasa cinta terhadap identitas kelompok bisa saja mendasari terjadinya konflik karena akibat dari faktor eksternal yang dianggap mengancam dan mengganggu kelompoknya.¹⁸

Pada tanggal 12 Desember Komisi D DPRD Gresik mengadakan rapat dengan pihak MTA untuk mengklarifikasi keresahan masyarakat terhadap keberadaan MTA di Kabupaten Gresik dipimpin langsung oleh ketua Komisi D Chumaidi Maun, dalam rapat tersebut Komisi D DPRD Gresik menyimpulkan dan memberikan rekomendasi kepada Pemda Gresik untuk menghentikan sementara kegiatan MTA guna meredam keresahan masyarakat, surat tersebut diteruskan kepada Bupati Gresik pada tanggal 30 Desember 2013 dengan surat pengantar dari ketua DPRD Gresik saat itu Zulfan Hasyim. Ini didasarkan dari

¹⁷ “GP Ansor Gresik Siap Melwan Majelis Tafsir Al-Qur’an”, <http://gresik.co/gp-ansor-gresik-siap-melawan-majelis-tafsir-al-quran/> (Kamis, 19 April 2018, 14.00)

¹⁸ Hakimul Ikhwan Affandi, *Akar Konflik Sepanjang Zaman Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 10.

Kelembagaan penyelesaian konflik terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial, serta Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.²³

Setelah adanya desakan dari beberapa elemen masyarakat dan instansi keagamaan, tentang keresahan masyarakat atas keberadaan MTA di Kabupaten Gresik, Kesbangpol pada tanggal 16 Desember 2013 meminta keterangan kepada pihak MTA.²⁴ Menurut Eko Adi Waludjo selaku kepala Kesbangpol saat itu, menjelaskan bahwa Kesbangpol masih melakukan pengawasan terhadap MTA, ini dikarenakan Kesbangpol tidak bisa secara langsung menutup MTA, karena belum ada bukti-bukti MTA melakukan pelanggaran, tetapi jika memang ada pelanggaran Kesbangpol akan langsung menutup MTA, maka dari itu Kesbangpol masih melakukan kajian dan pengawasan terhadap MTA.²⁵

Menurut bapak Nugroho selaku Pegawai Pemerintahan di Kantor Kecamatan Kebomas yang sempat mengetahui kejadian konflik tersebut, menjelaskan bahwa sempat beberapa kali diadakan rapat di Kantor Kecamatan Kebomas bersama dengan MUI Kecamatan Kebomas, perwakilan MTA, perwakilan dari GP Ansor, pihak Kelurahan Sidomoro, pihak Kecamatan Kebomas dan pihak dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik yang difasilitasi oleh Kesbangpol Gresik.²⁶ Pada tanggal 23 Desember 2013 pada rapat di Pendopo Kecamatan Kebomas yang difasilitasi oleh Kesbangpol

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 40.

²⁴ Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Berita Acara Permintaan Keterangan, 16 Desember 2013.

²⁵ "Bakesbangpol Gresik Ragu Tutup Aktifitas Majelis Tafsir Al-Qur'an", <http://www.kiblat.net/2013/12/14/bakesbangpol-gresik-ragu-tutup-aktifitas-majelis-tafsir-alquran/> (Jumat, 20 April 2018, 16.00).

²⁶ Nugroho, *Wawancara*, Kantor Kecamatan Kebomas, 25 Juni 2018.

Kabupaten Gresik, menghasilkan keputusan untuk menutup segala bentuk kegiatan Majelis Tafsir Al-Qur'an, karena dianggap meresahkan masyarakat.²⁷

Adanya musyawarah dalam menyelesaikan masalah ini, karena dalam Undang-undang sudah ditentukan, penyelesaian konflik harus melalui musyawarah mufakat, yang diatur juga dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Konflik Sosial. Untuk tugas dan fungsi satuan tugas penyelesai konflik sosial diatur dalam pasal 43 ayat (1) sampai (3) yang menyebutkan bahwa.

- (1) Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial bertugas menyelesaikan konflik sosial melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Penyelesaian Konflik melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam konflik.
- (3) Dalam hal penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan.²⁸

Pada tanggal 24 Desember 2013 diadakan rapat di ruang rapat Putri Cempo Gedung Pemerintahan Kabupaten Gresik, untuk menindak lanjuti hasil temuan intelejen, bahwasanya sesuai dengan temuan yang ada kegiatan MTA di Kabupaten Gresik banyak mengundang protes oleh sebagian masyarakat. Hadir dalam rapat tersebut diantaranya Bupati Gresik, Wakil Bupati Gresik, Dandim 0817 Gresik, Kapolres Gresik, Kepala Kejaksaan Gresik, Asisten I Setda Gresik, Kabag Hukum Kabupaten Gresik, Kementrian Agama Gresik, Ketua FKUB Gresik, MUI Gresik, Kepala Kesbangpol Gresik, Ketua PCNU Gresik, Banser Kabupaten Gresik, Kasat Intel Polres Gresik, Pasi Intel Kodim 0817 Gresik,

²⁷ Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Anshor Kabupaten Gresik, Surat Nomor 030/PC/SR-1/XII/2013 Kepada Bupati Gresik, Tentang Penutupan Kegiatan Majelis Tafsir Al-Qur'an di Kabupaten Gresik. 25 Desember 2013.

²⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 43.

Maka dari itu diadakan lagi rapat koordinasi tindak lanjut dan evaluasi penghentian sementara kegiatan MTA yang diadakan di Ruang Rapat Kantor Kesbangpol Kabupaten Gresik pada 8 Januari 2014. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai MTA yang tidak mematuhi surat penghentian yang dikeluarkan pada 2 Januari 2014, perwakilan MTA yang mengikuti rapat tersebut merasa keberatan dengan keputusan tersebut karena MTA keberadaannya adalah legal, apabila MTA diberhentikan maka yang berhak memberhentikan adalah Kementerian Hukum dan HAM karena surat izin IMB sudah ada di Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi Kasat Intel Polres saat itu menegaskan bahwasanya keputusan yang diambil oleh pemerintah adalah hasil keputusan bersama rapat Forminda, oleh karena itu jika MTA mengajukan pengamanan ke Polres untuk mengadakan kegiatan maka Polres melanggar kesepakatan, oleh karena itu saat itu Kasat Intel Polres meminta kepada MTA untuk mematuhi surat tersebut. Akhirnya MTA bersedia memberhentikan sementara kegiatannya tetapi meminta kejelasan waktu sampai kapan batas waktu kegiatan MTA ini akan diberhentikan.³³

Dari sikap MTA yang tidak mematuhi surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Kesbangpol pada 2 Januari 2014, memunculkan reaksi dari teman-teman NU Kabupaten Gresik, sehingga GP Ansor Gresik mengambil tindakan, pada hari Sabtu 25 Januari 2014 dengan mendatangi kantor Majelis Tafsir Al-Qur'an bersama beberapa warga dari Kelurahan Sidomoro yang mendukung ditutupnya MTA dan melakukan aksi demo didepan kantor Majelis Tafsir Al-Qur'an menuntut ditutupnya kantor cabang Majelis

³³ Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, Notulen Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pasca diturunkannya Surat Pemberhentian Sementara. 8 Januari 2018.

menutup kegiatan MTA di Kabupaten Gresik maka K.H Masbuhin Faqih siap untuk mengerahkan para santrinya untuk berdemonstrasi menuntut ditutupnya MTA di Kabupaten Gresik. Maka dari itu saat itu konflik ini mulai ada kemungkinan tereskalasi semakin luas jika tidak segera ditangani.

2. Dalam upaya penanganan konflik hal pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik adalah pengawasan terhadap Majelis Tafsir Al-Qur'an saat terjadinya demonstrasi sampai pada pasca diturunkannya surat pemberhentian sementara kegiatan MTA Kabupaten Gresik. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik kekerasan dan pererusakan sehingga Pemerintah Gresik berusaha meredam konflik agar jangan sampai tereskalasi semakin luas. Beberapa kali pertemuan dengan pihak-pihak terkait juga beberapa kali dilakukan yang difasilitasi langsung oleh Kesbangpol Kabupaten Gresik, yang puncaknya pada 24 Desember 2014 sepakat untuk menutup sementara kegiatan MTA sampai batas waktu yang tidak ditentukan, keputusan ini diambil karena Pemerintah Kabupaten Gresik juga berkoordinasi dan meminta masukan dari ormas-ormas keagamaan dan instansi pemerintah yang mengurus masalah sosial keagamaan dan kerukunan antar umat beragama, sehingga keputusan ini bukan keputusan sepihak yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Surat resmi pemberhentian dikeluarkan oleh Kesbangpol pada 2 Januari 2014. Pemerintah Kabupaten Gresik dalam hal penyelesaian konflik ini sudah memenuhi sesuai aturan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Meskipun pasca diturunkannya surat pemberhentian kegiatan MTA

Gresik dalam praktiknya tidak memenuhi aturan tersebut dengan baik, tetapi Pemerintah Gresik melalui rapat koordinasi membahas evaluasi pasca diturunkannya surat pemberhentian kegiatan MTA Gresik, dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan tokoh masyarakat berhasil meyakinkan MTA untuk mentaati surat tersebut, dengan tetap ada koordinasi baik dengan Pemerintah Daerah.

3. Untuk kondisi pasca konflik keadaan di Kelurahan Sidomoro kembali normal, dan konflik sudah berhasil diredam, penulis sendiri juga belum menemukan keterangan sampai batas waktu kapan saat itu MTA diberhentikan, karena semenjak diturunkannya surat pemberhentian dan rapat terakhir membahas tentang evaluasi pasca konflik seiring berjalannya waktu masalah ini tidak lagi muncul konflik. Kondisi sosial masyarakat juga kembali normal, MTA juga sekarang sudah kembali beraktifitas seperti biasa dan mengadakan pengajian setiap hari Kamis dan hari Minggu. Tetapi perbedaannya saat sebelum dan sesudah terjadinya konflik MTA Kabupaten Gresik sudah tidak lagi menyinggung amaliah-amaliah warga sekitar yang notabennya mayoritas warga NU, meskipun penulis masih menemukan keluhan beberapa warga yang tidak suka dengan sikap jamaah MTA yang terkadang mengganggu lingkungan seperti parkir sembarangan dan sebagainya, tetapi hal tersebut belum memiliki potensi untuk menjadi sebuah konflik terbuka. Selain itu setelah penyelesaian konflik MTA Perwakilan Gresik yang berada di Kelurahan Sidomoro menjadi agak tertutup, meskipun begitu kondisi sosial masyarakat masih tetap terjaga.

